

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian kesejahteraan masyarakat diselenggarakan melalui pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, urusan dan kewenangan dalam otonomi daerah diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Guna memberikan pedoman dan arah dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, berkewajiban menindaklanjuti RPJMD dengan menyusun Rencana Strategis Kecamatan.

Disamping sebagai instrumen perencanaan, Renstra-OPD berfungsi pula sebagai salah satu alat ukur penilaian kinerja perangkat daerah. Penilaian kinerja mengacu pada penyelenggaraan urusan, tugas pokok dan fungsi OPD. Bertolak dari hal tersebut, maka salah satu bahan penyusunan Renstra-OPD didasarkan pada tugas pokok, fungsi dan kewenangan OPD.

Berdasarkan uraian di atas, dan sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka Kecamatan Udanawu menyusun Rencana Strategis Kecamatan Udanawu Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis memuat visi pencapaian pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Guna mencapai tujuan yang diharapkan, perlu dirumuskan strategi pencapaian yang tepat. Sesuai dengan karakteristik kelembagaan OPD kecamatan yang berbasis pemerintahan kewilayahan, maka strategi pencapaian Renstra Kecamatan dirumuskan melalui penguatan fungsi dan kewenangan kecamatan, yaitu:

1. Fungsi Pembinaan Wilayah, yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah Kecamatan Udanawu yang kondusif yang memiliki daya dukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Blitar.
2. Fungsi Pelayanan Publik, yang bertolak dari posisi kecamatan sebagai perangkat daerah yang terdekat posisinya dengan masyarakat dan sejalan dengan strategi mendekatkan institusi pelayan kepada masyarakat.

Rencana strategis (Renstra) ini disusun sebagai bentuk penerjemahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2016 s/d 2021. Renstra merupakan rencana strategis 5 tahun yang akan dilaksanakan oleh OPD kantor ketahanan pangan dalam melaksanakan program/kegiatan. Dalam rencana strategis ini memuat visi dan misi OPD dalam menyukseskan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud disini adalah Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih melalui pemilihan umum kepala daerah yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2015. Selain itu, dalam renstra memuat tujuan dan sasaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Udanawu

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang dipakai untuk menyusun Renstra antara lain :

- ❖ Landasan Idiil : Pancasila
- ❖ Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- ❖ Landasan Konseptual :
  1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008;

❖ Landasan Operasional :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Pembentukan OPD Kecamatan.
8. Surat Edaran Bupati Blitar Nomor : 050/425/409.2016 Tentang Penyusunan Rancangan RENSTRA OPD Kab. Blitar Tahun 2016 – 2021.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) OPD ini adalah sebagai pedoman/acuan bagi satuan kerja pemerintah daerah (OPD) dalam menyusun rencana strategis 5 tahunan OPD dan diturunkan di dalam rencana kerja (Renja) tahunan OPD yang berisi tujuan, sasaran serta program/kegiatan OPD.

Tujuan dari penyusunan rencana strategis (Renstra) ini adalah :

1. Memfokuskan arah kebijakan OPD dalam melaksanakan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih
2. Mempertajam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk mencapai program kerja yang ingin dicapai
3. Meningkatkan kinerja OPD dlm mencapai tujuan dan sasaran yg akan dicapai
4. Meningkatkan kinerja OPD dlm mencapai program/kegiatan yang telah ditargetkan
5. Mempermudah evaluasi kinerja OPD dalam upaya meningkatkan kinerja OPD

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun rencana strategis (Renstra) ini telah ditetapkan poin-poin yang akan disampaikan antara lain :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN OPD**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

### **BAB III: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

### **BAB IV.: TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan OPD

### **BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

### **BAB VI. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

## **BAB II**

### **GAMBARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur OPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Blitar, ditetapkan tugas kecamatan adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi kecamatan adalah :

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundangan-undangan;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

#### **Tugas Pokok dan Fungsi (Sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan)**

##### **Camat:**

Bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

Fungsi Camat:

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

### **Sekretaris Kecamatan**

Bertugas membantu Camat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan ketatausahaan, urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum dalam lingkungan kantor kecamatan.

Fungsi Sekretaris Kecamatan:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja kecamatan.
- b. Evaluasi, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja.
- c. Penyiapan bahan dan data untuk perumusan kebijakan dan operasional pembinaan yang dilakukan oleh Camat.
- d. Penyiapan bahan koordinasi Camat.
- e. Mengkoordinasi dan pemberian pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan kantor Kecamatan.
- f. Pengkoordinasian anggaran keuangan belanja langsung maupun tidak langsung kecamatan ;
- g. Pengelolaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan umum, dan rumah tangga kantor ;
- h. Pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data serta dokumentasi.
- i. Pelayanan administrasi kepada warga masyarakat.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan**

Bertugas menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana program dan perencanaan anggaran Kecamatan, monitoring dan evaluasi hasil program serta mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan kecamatan.

Fungsi Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan:

- a. Pengumpulan bahan dan penganalisaan data guna penyusunan rencana program kegiatan dan penyusunan anggaran keuangan kecamatan.
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung ;
- c. Penyiapan bahan penyusunan, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan. Serta pengujian pembayaran ;
- d. Penyiapan bahan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor ;
- e. Penyiapan bahan penyusunan kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan ;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan, serta dokumen pendukung ;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran ;
- h. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi hasil program kerja kecamatan ;
- i. Penghimpunan dan penganalisaan data guna penyajian informasi tentang kecamatan ;
- j. Penganalisaan hasil pelaksanaan program kecamatan ;
- k. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan hasil program kerja kecamatan ;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Bertugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, memelihara barang – barang inventaris, serta administrasi kepegawaian.

Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan administrasi kepegawaian di kecamatan dan kelurahan dalam wilayahnya.
- b. Penyelenggaran urusan rumah tangga, rapat – rapat, tamu – tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan.
- c. Penyelenggaran urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan.
- d. Penyusunan rencana kebutuhan barang, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan dinas.
- e. Pelaksanaan penerbitan, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya.
- f. Penyusunan laporan tahunan tentang barang inventarisasi kantor.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

### **Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan memiliki tugas:

- a. Menyusun program kerja penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan dan Kelurahan ;
- b. Melaksanakan pembinaan perangkat Kelurahan ;
- c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
- d. Melakukan kegiatan pembinaan keagrariaan dan adminstrasi bidang pertanahan ;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, transmigrasi serta ketenagakerjaan ;
- f. Melaksanakan fasilitasi di bidang kesatuan bangsa, organisasi sosial politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ;
- g. Menyiapkan bahan koodinasi laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Kelurahan ;

- h. Memfasilitasi/ pembentukan dan pemberdayaan Badan Perwakilan Desa ( BPD) dan lembaga-lembaga lainnya.
- i. Membantu penarikan dan pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah serta redistribusi ;
- j. Menghimpun, mengolah, menyajikan, dan memelihara data dan dokumentasi tentang potensi dan monografi Kecamatan ;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja bidang ketentraman, ketertiban masyarakat ;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. Melakukan pemantauan, pencatatan dan pendataan serta menyampaikan laporan kejadian tindak kriminal ;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- e. Membantu pelaksanaan penegakan hukum dan peraturan daerah ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat .

### **Seksi Pembangunan**

Seksi Pembangunan memiliki tugas:

- a. Menyusun program kerja pembangunan di wilayah Kecamatan ;
- b. Mengolah dan mempersiapkan bahan-bahan dalm rangka koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di wilayah kecamatan ;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program dan proyek masuk desa dan kelurahan ;
- d. Menyiapkan bahan koodinasi penyusunan program, pemantauan dan pembinaan usaha pengembangan perekonomian rakyat, produksi dan distribusi ;

- e. Menyusun bahan pembinaan dan memberikan fasilitasi dalam upaya pengembangan usaha-usaha ekonomi desa dan lembaga perkreditan rakyat ;
- f. Menyusun bahan pembinaan peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah tingkat kecamatan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan ;
- h. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan bidang pertanian dan pengairan pedesaan ;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan lingkungan hidup ;
- j. Memfasilitasi pemberdayaan lembaga pengelola pembangunan desa dan kelurahan ;
- k. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Camat.

### **Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial memiliki tugas:

- a. Menyusun kegiatan dan progam kerja dibidang kesejahteraan sosial ;
- b. Menyusun bahan koordinasi dan, pembinaan bidang kesehatan, keagamaan, keluarga Berencana, Sosial budaya, olah raga dan generasi muda serta pelayanan sosial ;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengumpulan bantuan dalam rangka memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terkena bencana alam ;
- d. Menyusun bahan dan pembinaan pelaksanaan program PKK ;
- e. Menghimpun data sarana dan prasarana peribadatan, pendidikan agama dan lembaga keagamaan lainnya ;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan dalam rangka memperingati hari – hari besar keagamaan ;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan-kegiatan dalam upaya pengentasan kemiskinan di kecamatan ;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan dan fasilitasi terhadap penyandang masalah sosial ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **Seksi Pelayanan Publik**

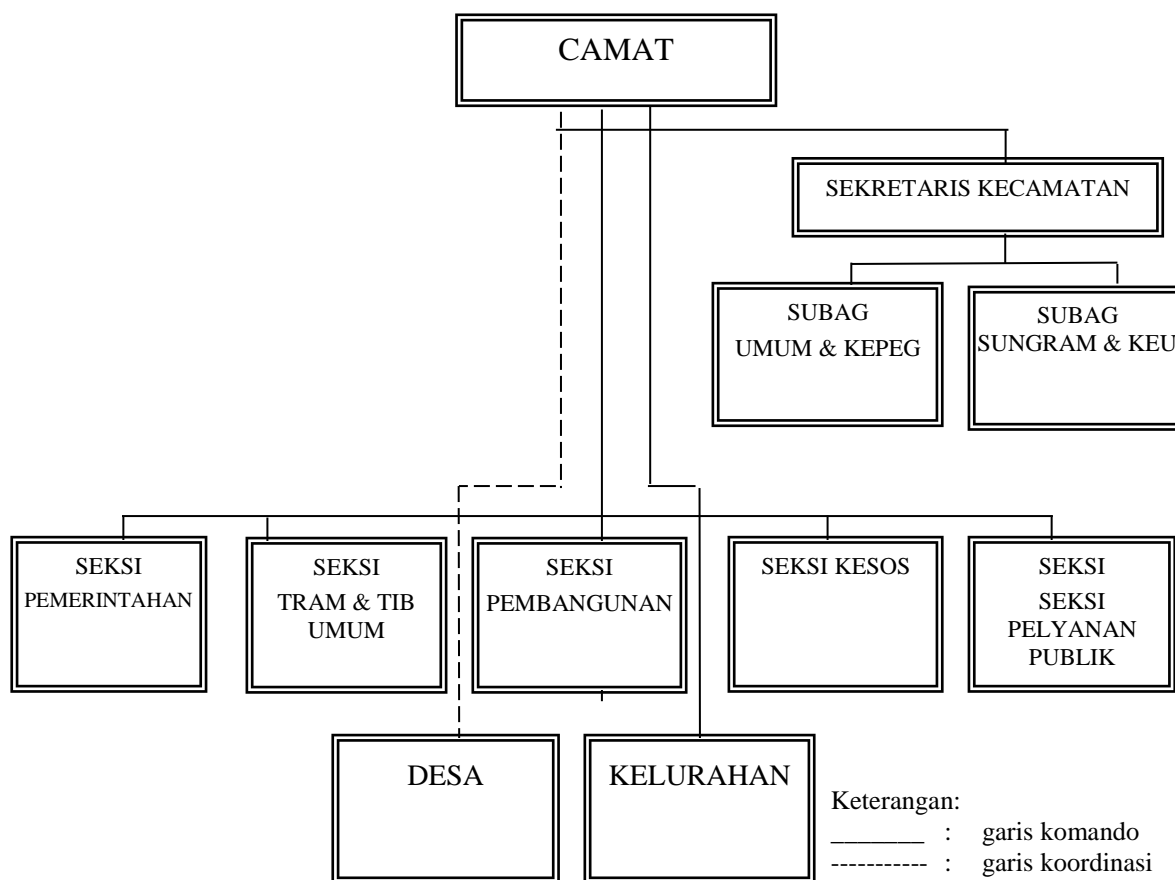
Seksi Pelayanan Publik memiliki tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan pelayanan Publik (SPP)
- b. Penyusun pengukuran IKM dan atau melaksanakan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan ;

Sedangkan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Blitar, struktur organisasi Kecamatan Udanawu terdiri dari :

1. Camat ;
2. Sekretariat Kecamatan yang dipimpin Sekretaris Kecamatan, yang membawahi :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi-seksi yang terdiri dari :
  - a. Seksi Pemerintahan
  - b. Seksi Pembanguann
  - c. Seksi Kesejahteraan Sosial
  - d. Seksi Pelayanan Publik
  - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Udanawu sebagai berikut :



## 2.2 Sumber Daya OPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Udanawu pada tahun 2016 didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya OPD yang dimiliki.

Sumber daya manusia yang ada di Kantor Kecamatan Udanawu terdiri dari 17 orang dengan spesifikasi sebagai berikut :

No.	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)
1.	Camat	S-2	1
2.	Sekretaris Kecamatan	S-2	1
3.	Kasi Sosial	S-2	1
4	Kasi Pemerintahan	SLTA	1
5	Kasi Pembangunan	S-2	1
6	Kasi Trantib	S-1 Hukum	1
7	Kasi Pelayanan Publik	S-1 Sosial	-
8	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	S-1 Sosial	1
9	Kasubag Umum Dan Kepegwaian	S-1 Sosial	1
10	Staf	S-2 Manajemen	1
11	Staf	S-1 Sosial	1
12	Staf	SPDN	1
13	Staf	S-1 Sosial	1
14	Staf	S-1 Sosial	1
15	Staf	S-1 Sosial	1
16	Staf	SLTA	1
17	Staf	SLTA	1
<b>JUMLAH</b>			<b>17</b>

Dalam mendukung kinerja OPD, sumber daya OPD yang dimiliki untuk dimanfaatkan sebagai pendukung kinerja adalah aset tetap yang perolehannya berasal dari hasil pengadaan/pembelian serta berasal dari hibah, antara lain :

No.	MACAM ASET TETAP	KONDISI	NILAI (Rp.)	JUMLAH BARANG (buah/unit)
1.	Tanah Bangunan	Baik	164.160.000	1
2.	Peralatan dan Mesin	Baik	873.475.625	101
3.	Bangunan	Baik	360.426.700	9
4.	Aset tetap lainnya	Rusak	5.250.000	1
JUMLAH			1.240.652.325	112

### 2.3 Kinerja OPD

Kantor Kecamatan Udanawu merupakan salah satu OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Blitar yang melaksanakan urusan wajib. Dalam urusan wajib ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik. Adapun pencapaian kinerja pelayanan OPD Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam tabel 2.1:

Tabel 2.1  
CAPAIAN KINRJA RENSTRA SEBELUMNYA

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Prosentase kepuasan aparatur kec. Thd layanan administrasi perkantoran	90%	-	-			20	20	19			20	20	19			0,75	0,75	0,75
2.	Prosentase kepuasan aparatur thd fasilitas sarana prasarana aparatur	91%	-	-			20	20	19			20	20	19			0,75	0,75	0,75
3.	Prosentase perenc. Penganggaran, pengendalian serta pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu	90%	-	-			20	20	18			20	20	18			0,75	0,75	0,75
4	Prosentase pemahaman aparatur terhadap peraturan tentang pelayanan	90%	-	-			19	19	18			19	19	18			0,75	0,75	0,75
5.	Posentase Desa dengan administrasi desa berkualitas baik	90%	-	-			19	19	18			20	19	18			0,75	0,75	0,75

Tabel 2.2  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kantor Kecamatan Udanawu  
 Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kantor Kecamatan Udanawu	0	0	189.355.399	226.697.886	271.697.886	0	0	184.653.475	220.526.904	250.522.982	0	0	97,51	97,27	92

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Udanawu merupakan unit pelayanan umum kepada masyarakat, hal ini dapat dikatakan bahwa tugas utama yang diemban oleh Kantor Kecamatan Udanawu, apalagi di era reformasi dan globalisasi tentunya tidaklah ringan, karena langsung bersinggungan dengan masyarakat yang mempunyai karakter berbeda satu dengan yang lain.

Adapun Arah kebijakan dan strategi pembangunan di Kantor Kecamatan Udanawu adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menempatkan pelanggan sebagai “Raja” yang harus dilayani
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan masyarakat
3. Meningkatkan disiplin kerja Staf Kantor Kecamatan Udanawu
4. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan, baik intern Kantor Kecamatan Udanawu, maupun Desa dalam segi pemerintahan dan pembangunan.
5. Meningkatkan peran serta wanita dan generasi muda dalam memacu kegiatan pembangunan
6. Meningkatkan pembinaan ke Desa upaya pemberdayaan kinerja lembaga yang ada.
7. Meningkatkan pelaksanaan panca tertib pemerintah, meliputi :
  - a. Tertib Program
  - b. Tertib Anggaran
  - c. Tertib Administrasi
  - d. Tertib pelaksanaan
  - e. Tertib pengendalian dan pengawasan
8. Meningkatkan tribudaya , yaitu :
  - a. Budaya kerja
  - b. Budaya bersih
  - c. Budaya disiplin

Dilihat dari dinamika internasional terutama dilihat dari kawasan asean, penerapan *ASEAN Economic Community (AEC)* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membuat Semakin terbukanya hubungan antar negara sebagai akibat kemajuan di bidang telekomunikasi dan transportasi menunjukkan adanya saling ketergantungan dan regionalisasi ekonomi berbagai negara. Posisi geografis Indonesia yang strategis menuntut adanya regionalisasi ekonomi dengan berbagai negara di sekitar Asia Pasifik, seperti AFTA, APEC dan EPA. Melalui regionalisasi ekonomi yang ada, diharapkan kinerja ekonomi Indonesia, terutama ekspor maupun impor, semakin membaik. Meningkatnya ekspor diharapkan juga mampu mendorong kinerja industri melalui meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta daya saing industri. Selain itu, adanya integrasi ekonomi ini menuntut adanya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja (buruh) serta modal yang semakin tinggi. Dengan demikian tenaga kerja suatu negara bisa bekerja di negara lain secara lebih mudah, termasuk di dalamnya kegiatan investasi antar negara. Di Indonesia, dan di Provinsi Jawa Timur pada khususnya, Regionalisasi semacam AEC adalah realitas yang tak terhindarkan yang menyebabkan terjadinya liberalisasi perdagangan dan mendorong meningkatnya persaingan perdagangan dalam memasuki pasar global. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan juga menyebabkan persaingan dipasar domestik, terutama dengan kemungkinan masuknya barang – barang impor. Selain itu, perdagangan bebas juga memunculkan *non-tarif barriers* seperti standarisasi produk melalui ISO, *Eco Labelling*, HACCP dan lain– lain, yang dapat mengganggu kinerja perdagangan luar negeri kita. *Millenium Development Goals (MDG's)* dan *Sustainable Development Goals (SDG's)* merupakan isu global dari lahirnya deklarasi millenium atau *Millenium Development Goal's (MDG's)* yang diungkapkan dalam KTT Millenium di New York bulan September 2000 adalah masih tingginya angka kemiskinan di dunia dimana hampir separuh penduduk dunia hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dolar, sekitar 800 juta orang dalam kondisi kelaparan, derajat kesehatan yang masih rendah dimana setiap tahun hampir 11 juta anak meninggal sebelum mencapai usia balita, setiap tahun lebih dari 18 juta orang meninggal akibat hal-hal yang berhubungan dengan kemiskinan, umumnya mereka adalah perempuan dan anak-anak. Adanya

kesenjangan akses pada pendidikan antara anak lelaki maupun perempuan, ketidakpedulian manusia akan lingkungan dan solidaritas internasional juga menjadi latar belakang dicetuskannya MDG's. Sampai pada tahun 2015 diyakini bahwa MDG's belum tercapai. Secara tuntas, oleh karena itu perlu rencana pembangunan pasca MDG's 2015. Agenda pembangunan Pasca-Millennium Development Goals (MDGs) 2015 masih menempatkan upaya penurunan kemiskinan sebagai isu utama. Terdapat 3 (tiga) isu utama pada pasca-MDGs 15 tahun setelah tahun 2015, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemajuan pesat telah dibuat demi meraih MDGs. Kemiskinan dunia terus menurun. Semakin banyak anak mengikuti pendidikan dasar. Jumlah kematian anak telah berkurang secara drastis. Akses terhadap air minum yang aman meluas dengan sangat pesat. Pendanaan yang ditujukan untuk memerangi malaria, AIDS, dan TBC telah menyelamatkan jutaan jiwa. Tetapi dengan berakhirnya agenda MDGs pada akhir tahun 2015, Para pemimpin dunia telah menyerukan agenda ambisius baru untuk meningkatkan kehidupan manusia dan melindungi bumi bagi generasi masa depan. Pasca agenda pembangunan 2015, yang dikenal dengan istilah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2016-2030, diharapkan dapat menanggulangi berbagai masalah, termasuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, memajukan kesehatan dan pendidikan, membangun kota-kota secara berkelanjutan, memerangi perubahan iklim serta melindungi samudera dan hutan. Setelah lebih dari satu tahun perundingan konsultatif yang inklusif dan intensif, Kelompok Kerja Terbuka Majelis Umum untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2016-2030 PBB mengajukan 17 tujuan spesifik dengan 169 target yang saling berkaitan. Negara-negara anggota PBB telah menyepakati bahwa agenda yang disusun oleh Kelompok Kerja Terbuka akan menjadi basis utama untuk proses antar pemerintah. Selain itu, jika dilihat dari aspek lingkungan hidup, perubahan iklim dan pemanasan global sebagai akibat dari peningkatan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada keanekaragaman hayati, desertifikasi (degradasi lahan, lahan kering semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi dan kehidupan liar), kenaikan temperatur serta terjadi pergeseran musim. Dan yang merupakan kekhawatiran kita di masa yang akan datang adalah ancaman global terhadap krisis pangan, dimana

pertumbuhan penduduk dunia yang semakin pesat yang diikuti oleh semakin besarnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian telah berdampak pada semakin terbatasnya ketersediaan pangan dunia, sehingga perlu upaya-upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki struktur produksi pangan yang diikuti dengan menekan laju pertumbuhan penduduk. Keterbatasan energi dan pengembangan energi baru terbarukan, pertambangan ilegal dan pertambangan berkelanjutan. Sanitasi dan kelestarian lingkungan kurang diperhatikan. Konektifitas, infrastruktur, pelayanan transportasi yang belum memadai

Telaahan dinamika provinsi dilakukan dengan melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, dan beberapa isu atau kondisi terkini yang ada di Jawa Timur. a.RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 Kabupaten Blitar merupakan Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730). Secara Administratif Kabupaten Blitar berada diwilayah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga keberadaannya harus mampu mendukung pencapaian visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah:

"Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak"

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019,"Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak" tersebut, ditempuh melalui lima misi yang diberi judul: "Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik". Lima misi sebagai berikut:

1. Misi Pertama :

Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

2.Misi Kedua

Meningkatkanpembangunan ekonomiyanginklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.

3. Misi Ketiga

Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.

4. Misi Keempat :

Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

5. Misi Kelima :

Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Adapun sasaran pembangunan yang harus dicapai untuk mewujudkan visi dan misi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja.
2. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis.
3. Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.
4. Meningkatnya kuantitas, dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD).
5. Meningkatnya mutu pendidikan, dan tenaga kependidikan.
6. Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga.
7. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, termasuk tenaga medis dan non-medis secara merata.
8. Menurunnya angka kematian bayi, dan angka kematian ibu melahirkan.
9. Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimum.
10. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan.
11. Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan reproduksi.
12. Menurunnya persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan.
13. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
14. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
15. Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan Koperasi.
16. Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB).
17. Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan.
18. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan).
19. Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan).

20. Meningkatnya akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi.
21. *Food availability*: Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat
22. *Food utilization*: Meningkatnya penyerapan pangan
23. Meningkatnya akses pangan (*food acces*).
24. Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri.

Selain UMKM dan Koperasi sebagai penunjang positifnya isu ekonomi adalah pada bidang ketahanan pangan dan pertanian. Sekitar 42,5 persen dari seluruh tenaga kerja Jawa Timur terserap di sektor pertanian, namun sektor ini memiliki produktivitas paling rendah di dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Jawa Timur memiliki luasan lahan sawah sebesar 1.017549,73 hektar. Sebaran pemanfaatan potensi ini terwujud dalam bentuk surplus komoditas pangan yaitu beras sebesar 4,48juta ton . Meskipun demikian secara umum Jawa Timur sudah mampu mewujudkan sebagai provinsi yang berdaulat pangan, tetapi belum mampu untuk menentukan sepenuhnya kebijakan dan strategi produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang sehat, dan sesuai sumber daya dan budaya dengan metode yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perhatian khususnya kepada mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin rawan pangan. Selanjutnya faktor yang menjadi nilai negatif dari isu perekonomian adalah isu pengangguran dan kemiskinan. Isu strategis terkait pengangguran di Jawa Timur masih menyimpan masalah ketenagkerjaan yang cukup serius, diantaranya yakni: upah pekerja yang masih rendah, jaminan/perlindungan sosial tenaga kerja, dan skil/keahlian tenaga kerja yang masih minim. Selain masalah tersebut, pengangguran juga memiliki korelasi dengan perubahan struktur perekonomian. Pergeseran aktivitas sektor industri yang lebih dominan juga memainkan peran terhadap perubahan tenaga kerja. Pengembangan industri pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa agar menjadi bangsa yang modern dan maju serta meningkatkan kemandirian. Capaian penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa timur yang terus menunjukkan perbaikan, menggambarkan kesungguhan pemerintah bersama stake holder dalam upaya penanganan masalah kemiskinan.

Berdasarkan data BPS (BRS 2 Januari 2014), pada tahun 2012 per bulan september jumlah penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 4.960.540 jiwa atau 13,08%, kemudian menurun menjadi 4.865.820 jiwa atau 12,73% pada September tahun 2013, mengalami penurunan sebesar 0,35 poin persen. Meskipun demikian, capaian persentase penduduk miskin Jawa Timur ini masih diatas persentase nasional. Persentase penduduk miskin nasional pada september 2012 mencapai 11,66% dan menjadi 11,47% pada tahun 2013. Selain itu, bila kita perhatikan lagi untuk masalah regional propinsi jawa timur yang mana daya saing nasional dalam *ASEAN Economic Community* (AEC), Jawa Timur masih perlu perlindungan dan peningkatan mutu tenaga kerja dan mutu produk yan baik. Dari segi transportasi masih perlunya sinkronisasi sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah dalam tatanan pelayanan transportasi dan peningkatan keterjangkauan pelayanan transportasi perintis untuk mendukung pengembangan wilayah. semakin besarnya subsidi dan instabilitas harga komoditi yang ditandai dengan beban subsidi yang mempengaruhi ketahanan fiskal pemerintah, kompleksitas pasar harus disikapi dengan kebijakan yang tepat guna mewujudkan stabilitas harga. Situasi pangan di indonesia pada tahun 2014 tidak lebih baik dibandingkan 2013. Hal ini ditandai dengan meningkatnya impor lima komoditas pangan utama. Hal ini disebabkan sistem pangan nasional terintegrasi dengan sistem pangan global yang menyebabkan indonesia masuk dalam “jebakan impor pangan”. Implementasi undang-undang desa dalam lingkup kewenangan propinsi yang mana implementasi undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa, di Jawa Timur sebanyak 7.722 desa, kelurahan 783 dan kecamatan 664 merupakan wilayah yang sangat luas, sehingga memerlukan adanya koordinasi yang baik dan berkelanjutan di semua proram pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penawasan dan pelaporannya. Dari sisi infrastruktur masih perlunya percepatan penurunan angka *backlog* perumahan, mempertahankan surplus sepuluh juta ton beras dan tampungan air baku berupa waduk dan embung, peningkatan daya dukung, kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana lalu lintas angkutan jalan, peninkatan armada perintis di wilayah yang sedang dan belum berkembang, peningkatan keterpaduan jaringan prasarana darat, laut dan udara. Dari sisi penerapan SPM atau standar pelayanan minimal yang

merupakan salah satu bagian dari prioritas utama dari 11 prioritas nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola. Prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola menginginkan terjadinya pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan. Dari sisi pengarusutamaan gender yang mana integrasi pengarusutamaan gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki maupun anak perempuan. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mana dinamika pembangunan yang terjadi saat ini akan berdampak pada alih fungsi lahan produktif pertanian, khususnya di lokasi lahan pertanian yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sehingga perlu upaya-upaya pengendalian untuk menjaga konsistensi Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka mendukung perwujudan pencapaian target ketahanan pangan nasional. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sehingga rencana tata ruang wilayah sebagai matra spasial pembangunan belum diacu dalam implementasinya oleh berbagai sektor sehingga berdampak pada pengembangan wilayah yang tidak terkendali. Lingkungan hidup meliputi perusakan/kebakaran hutan, banjir/longsor, kemarau panjang, perburuan/perdagangan hewan dilindungi, penghancuran terumbu karang, polusi air dari limbah industri, polusi udara, limbah B3, pembuangan sampah tanpa pengolahan, serta rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca (RAN GRK). Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan beras (88,6 kg/kapita/tahun). Pola konsumsi pangan masyarakat belum berimbang (skor PPH 79). Harga bahan pangan masih fluktuatif dan keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius.

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD**

Kecamatan Udanawu sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati. Serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh OPD ( Dinas, Badan, Lembaga ) lain dilingkup Kabupaten Blitar.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan kecamatan udanawu kabupaten blitar yang berkait dengan tugas umum pemerintahan dapat diidentifikasi 3 ( tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan kecamatan udanawu, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan tehns operasional

Pada tataran kebjaa kecmatan udanaw udanawu apat diidentifikasi permasalahan utama pada kecamatn udanawu sebagai berikut :

1. Belm adanya penilaian yang terukur terhaap kualitas pelayanan publik pada kecamatan udanawu yang dilakukan oleh kabupaten blitar
2. Belum aanya enilaian yang terukur terhdap akuntabilitas kinerja ecmata udanawu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar
3. Kebjaka enetapan anggaran yang relaif lamadalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga berdampak pada mundurnyapelaksanaan program dan kegiatan di kecamatan udanawu.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatanpada bagian unt keja dligkungan kantor kecamatan udanawu dapat di identifikasi permasalahan pelyanan kantor kecamatan udanawu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya partisipasi lmb aga kemasyarakatan tingkat kecamatan an b elum optimalnya penyerapan swaaya murni dari masyarakat
2. Masih adanya ego sektoral masing-masing OPD tentang program dan kegiatan
3. Belum optimalnya perencanaan strategis pada tingkat OPD, hal ini dikrenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana

membuat rencana strategis untuk OPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun

4. Tingkat koordinasi antar aparaturnya masih rendah
5. Belum optimalnya kapasitas aparaturnya kewilayahan, khususnya pemahaman tentang program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD yang bersangkutan
6. Tingkat koordinasi antar lembaga kemasyarakatan dalam penanganan keencanaannya masih belum optimal
7. Masih kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap pengadaan barang dan jasa (metode swakelola)

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan di kecamatan Udanawu antara lain :

1. Kurangnya Sumber daya manusia (SDM) kecamatan dan Desa/kelurahan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas yang diberikan sering kali overload
2. Masih belum optimalnya penyediaan ATK, rana dan prasarana pemeliharaan alat-alat kantor
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelayanan di kantor kecamatan Udanawu sebagai OPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah adalah faktor internal dan eksternal.

Untuk permasalahan internal di kantor kecamatan Udanawu adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dan kapasitas aparaturnya belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparaturnya, mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparaturnya yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien;

Sedangkan untuk masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Kanor Kecamatan Udanawu sebagai berikut:

1. UUD No.23 Tahun 2014, tentang pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa perangkat daerah yang terkecil adalah kecamatan, sehingga kedudukan kelurahan/desa merupakan bagian dari kecamatan yang mempunyai tugas membantu pekerjaan kecamatan di wilayah kelurahan/desa.
2. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan yang besar kepada Camat yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama antara kecamatan dan kelurahan/desa
3. Pelimpahan kewenangan kepada camat belum sepenuhnya didukung dengan personil, pembiayaan dan prasarana

Untuk itu Kantor Kecamatan Udanawu masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Sarana prasarana yang tersedia kurang lengkap  
 Dalam hal ini Kecamatan Udanawu memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara optimal, sekaligus mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana yang belum ada/kurang
2. Sistem Kerja yang belum optimal  
 Masih terbatasnya kewenangan Kecamatan dalam melaksanakan pembangunan wilayah, sehingga perlu koordinasi yang baik dengan leading sektor / OPD lain ( Cipta Karya, Bina Marga, Bapemas, Dinas Sosial ) dan lain-lain.
3. Keterbatasan Sumberdaya Manusia yang memadai  
 Keterbatasan jumlah pegawai yang ada, serta SDM yang kurang. Dalam hal ini Kecamatan Udanawu memberdayakan pegawai yang ada secara optimal dan mengirimkan untuk melakukan pelatihan-pelatihan/Bintek untuk meningkatkan Sumber daya yang ada.
4. Keterbatasan sumber dana  
 Dalam hal ini Kecamatan Udanawu melakukan prioritas program dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya sebagaimana hasil Musrenbang Desa maupun Musrenbang Kecamatan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas maka dapat ditarik kesimpulan “bahwa isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Udanawu dalam kurun waktu 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi pemerintah daerah (pelayanan publik)

Birokrasi pemerintah daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dimandatkan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dimasa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah .

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan ditingkat kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah :peningkatan pelayanan publik , akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN

2. Pendetayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kabupaten Blitar terhadap kebutuhan pelayanan prima ( services excellent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal ( *public services and publik complaint*)

Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “**Pelayanan Masyarakat**” .

Selain hal itu upaya aparatur juga diarahkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen

pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas dan peningkatan efektifitas dan efisiensi serta upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

### 3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik.

Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan kecamatan dan kelurahan/desa, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada manata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan interletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan/desa, OPD dilingkungan pemerintah kabupaten blitar dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang taruna, Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan sebagai stakeholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokasinya melalui penataan sistem dan prosedur kerja ; meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system; perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

### 4. Pengelolaan keuangan dan uang

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi menjadi suatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *Entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada

pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*performance budget*) bukan kepada kebijakan (Policy Budget)

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial managementsystem*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di kantor kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep “Value formoney, sehingga tercipta akntabilitas publik

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan; enganggaran; pengadaan, pendistribusian; (termasuk pnyimpanan); penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan.

Setiap tahap mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan asset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legeslatif. Sasaran strategis yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain:

- a. Terwujudnya tertib administrasi mengenai : kekayaan daerah , menyangkut barang inventaris; tanah; bangunan; penghausan barang dan sistem pelaporan
- b. Tertiptanya efisiensi dan efektifias penggunaan barang daerah;
- c. Pengamanan barang daerah
- d. Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

**Visi** dan **Misi** Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang mana **Visinya** adalah “*Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing*”, sedangkan **Misinya** adalah :

1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran;

2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan, kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial serta penerapan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadahi;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan keterampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, ekonomi kreatif serta potensi lokal daerah;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Apabila kita pahami dengan seksama dari Visi Kepala Daerah terpilih, maka kita dapat menarik suatu garis besar bahwa dari visi dikaitkan dengan tugas dan fungsi kantor Kecamatan Udanawu yang merupakan kepanjangan tangan Kepala Daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka Kecamatan Udanawu merupakan ujung tombak keberhasilan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih tersebut, dengan :

1. Menciptakan kinerja Pegawai di Kecamatan Udanawu yang baik dengan meningkatkan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai sektor yang mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan menciptakan iklim keamanan yang kondusif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. Mengembangkan sikap mental positif sehingga dapat membangun citra pemerintahan/birokrasi yang bersih.

4. Melibatkan masyarakat sebagai bahan integral dari sistem pembangunan dengan mengembangkan dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pengambil keputusan.

### 3.3 Telaahan Renstra Kantor Kecamatan Udanawu

Kecamatan Udanawu merupakan satu wilayah yang membagi habis wilayah administrasi Kabupaten. Pada bab ini letak Geografis Kecamatan Udanawu menampilkan luas wilayah , jumlah desa/kelurahan, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, jumlah keluarga ,jumlah rumah tangga, tinggi ibu kota kecamatan dari permukaan air laut dan batas-batas wilayah.

#### 1. Letak geografis Kecamatan Udanawu

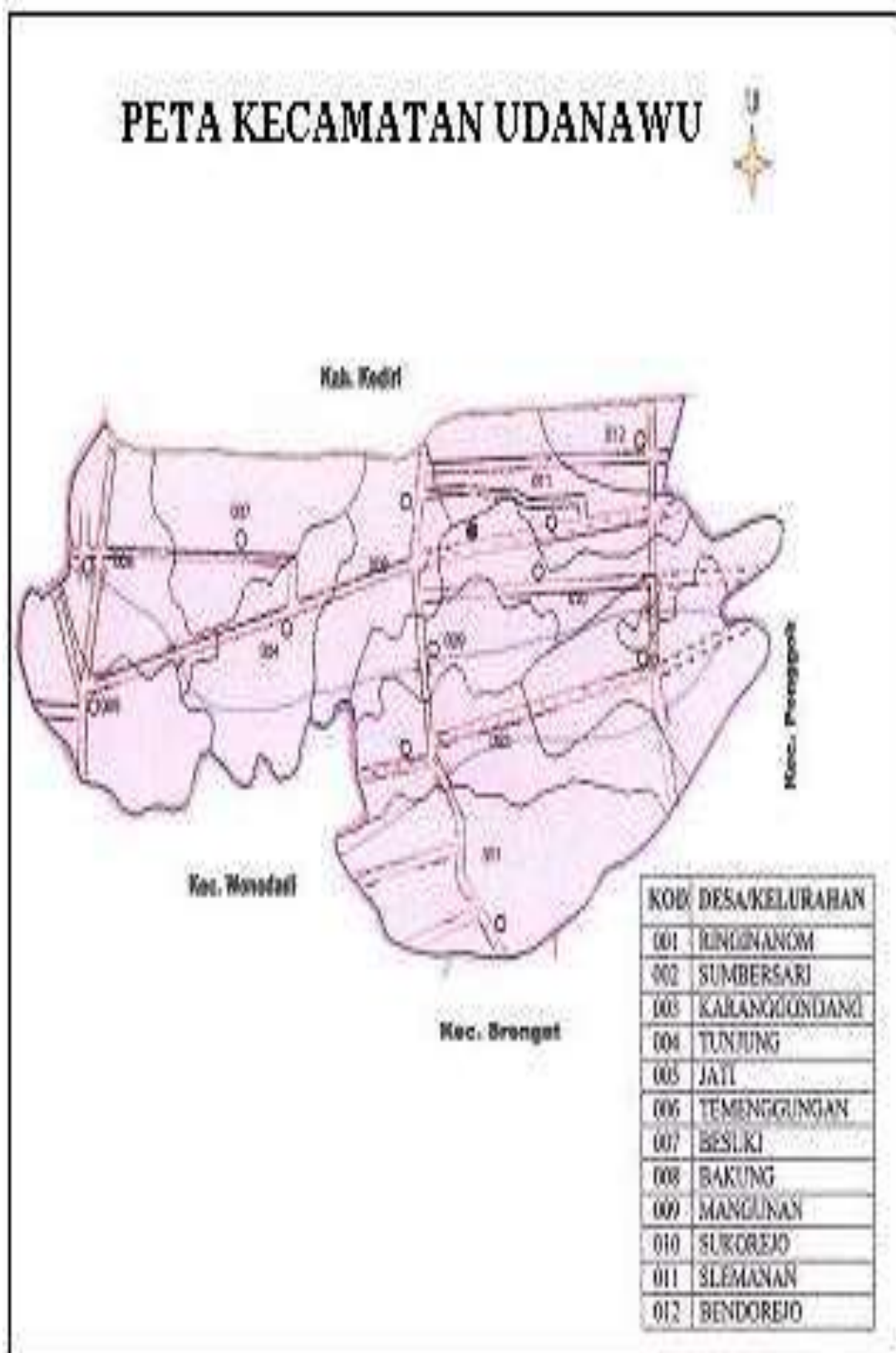
- Lua wilayah kecamatan udanawu : 40,98 Km<sup>2</sup>
- Terdiri atas : 12 Desa
- Jumlah penduduk : 40.186 Jiwa
- Kepadatan penduduk : 981 Jiwa
- Batas Wilayah Kecamatan Udanawu :

Sebelah utara berbatasan dengan :Kabupaten Kediri

Sebelah Timur berbatasan dengan :Kecamatan Ponggok

Sebelah Selatan berbatasan dengan :Kecamatan Srengat

Sebelah Barat berbatasan dengan :Kecamatan Wonodadi



## 2. Penduduk dirinci menurut Jenis Kelamin 2007 – 2014

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	2007	19.763	19.405	39.168
2	2008	18.923	19.135	35.058
3	2009	20.367	20.168	40.535
4	2010	20.300	20.160	40.460
5	2011	20.649	20.239	40.888
6	2012	20.149	19.597	39.746
7	2013	20.252	19.737	39.989
8	2014	20371	19815	40.186

Sumber : BPS (Kecamatan dalam angka ) Th.2014

## 3. Penduduk, Luas Wilayah, Keluarga, Kepadatan dan rata-rata ART dirinci menurut Desa.

No	Desa	Luas Wilayah ( Km2 )	Penduduk	Jumlah Keluarga	Kepada Tan	Rata-rata Anggota Keluarga
1	2	3	4	5	6	7
1	Ringianom	5,22	5.184	1.715	993	3,1
2	Sumbersari	3,48	3.008	957	864	3,3
3	Karanggondang	3,77	2.228	789	591	3,2
4	Tunjung	3,80	2.868	900	755	3,6
5	Jati	2,69	2.322	867	863	2,4
6	Tumenggungan	2,80	2.594	876	926	2,9
7	Besuki	2,09	2.220	782	1.062	2,9
8	Bakung	4,08	5.646	1.876	1.384	3,2
9	Mangunan	3,26	2.817	939	864	2,9
10	Sukorejo	4,34	5.039	1.555	1.161	3,5
11	Slemanan	3,70	4.668	1.244	1.262	3,0
12	Bendorejo	1,63	1.592	486	977	3,7
Kecamatan Udanawu		<b>40,98</b>	<b>40.186</b>	<b>12.986</b>	<b>998</b>	<b>3,1</b>

Sumber: BPS (Udanawu dalam angka ) Th.2014

## 4. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio per Desa

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	2	3	4	5	6
1	Ringianom	2.571	2.613	5.184	1,02
2	Sumbersari	1.552	1.456	3.008	0,93
3	Karanggondang	1.126	1.102	2.228	1,08
4	Tunjung	1.471	1.397	2.868	1,04
5	Jati	1.112	1.210	2.322	1,07
6	Tumenggungan	1.339	1.255	2.594	1,04
7	Besuki	1.129	1.091	2.220	0,87
8	Bakung	2.855	2.791	5.646	1,04
9	Mangunan	1.411	1.406	2.817	1,03
10	Sukorejo	2.554	2.485	5.039	1,01
11	Slemanan	2.449	2.219	4.668	1,10
12	Bendorejo	802	790	1.592	1,01
Kecamatan Udanawu		<b>20.371</b>	<b>19.815</b>	<b>40.186</b>	<b>1,02</b>

Sumber : BPS (Kecamatan dalam angka ) tahun 2014

## A. Analisis Lingkungan Internal

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, masalah yang timbul adalah berubahnya alih fungsi lahan yang dulu lahan pertanian untuk tanaman pangan begitu luas, sekarang menjadi sempit dengan penggunaan lahan pertanian untuk bangunan rumah atau pergudangan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan adanya kebijakan yang mengatur tentang tata ruang yang tidak efektif dan efisien akhirnya lahan pertanian menjadi tidak produktif lagi.

Ada 2 faktor yang mempengaruhi lingkungan internal yaitu ;

## 1. Faktor Pendorong

Pada faktor kekuatan ini ada 4 hal yang sangat berpengaruh penting yang menjadikan kekuatan bisa dimanfaatkan secara maksimal, yaitu:

a. Sumber daya manusia

Di Indonesia banyak sekali tersedia sumber daya manusia yang secara langsung bisa dimanfaatkan. Pada tingkat sekolah lanjutan atas banyak anak yang lulus SPMA atau SMK jurusan pertanian yang sudah diluluskan. Di tingkat perguruan tinggi ada ribuan sarjana yang sudah diluluskan. Selain dari pendidikan formal juga ada generasi muda yang mendalami bidang pertanian, baik dari hasil pelatihan dan dari hasil belajar secara otodidak dari orang tua yang pekerjaan mereka sebagai petani dan ikut kerja di perkebunan. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia yang merupakan Negara agraris mempunyai kekuatan sumber daya manusia yang besar dalam mendukung pembangunan pertanian.

b. Sarana/prasarana

Dengan semakin banyaknya lulusan dan sarjana pertanian merupakan modal tersedianya tenaga kerja yang handal dan bisa diberdayakan secara optimal. Dan dengan berkembangnya daya kreatifitas dari sarjana ini dapat memunculkan berbagai inovasi teknologi yang berdaya saing tinggi. hal tersebut membuat pembangunan bidang pertanian bisa berjalan dengan baik.

c. Keuangan

Negara Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam, yang apabila dimanfaatkan secara optimal, dapat dimanfaatkan sebagai modal utama dalam pembangunan bidang pertanian. Dengan memanfaatkan hasil dari bercocok tanam, berkebun, berternak hewan dan ikan, bisa diputar kembali sebagai modal dan mencukupi kebutuhan hidup rakyat Indonesia. Selain itu juga dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di pedesaan maka investasi tidak berhenti di kota saja, sehingga desa akan mendapat investasi dari perkembangan ekonomi yang baik, pendapatan warga desa akan meningkat karena tersedianya lapangan pekerjaan yang luas.

#### d. Teknologi

Dengan tersedianya SDM yang handal dan didukung sarana/prasarana serta keuangan yang baik, maka akan memunculkan teknologi yang baru yang dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Kemunculan teknologi tepat guna yang dirancang dan dibuat, bisa menghasilkan produk yang baik dan aman untuk dikonsumsi bagi masyarakat dan bahkan bisa dinikmati sebagai produk ekspor unggulan bangsa Indonesia, sehingga *in come* masyarakat dan devisa Negara meningkat.

### 2. Faktor Penghambat

Pada faktor kelemahan ini juga ada 4 hal yang berpengaruh penting sebagai pendukungnya, yaitu:

#### a. Sumber daya manusia

Dengan perubahan pola pikir dan persepsi yang berbeda dan bermacam-macam, maka banyak sarjana dan lulusan yang berpandangan bahwa pertanian merupakan sektor pekerjaan kuno yang pantas untuk ditekuni oleh orang tua dan orang desa saja. Selain itu banyak lulusan dan sarjana yang pergi ke kota atau luar negeri menjadi TKI dengan tujuan mencari uang banyak ketimbang mengolah sawah yang nilai uangnya sedikit dan tidak bergensi karena tidak bergelut dengan uang. Sehingga faktor tersebut menjadi kelemahan dalam pembangunan ketahanan pangan.

#### b. Sarana/prasarana

Kurangnya dukungan pendanaan dari pemerintah untuk sarana yang menunjang pembangunan ketahanan pangan menjadi sebab kelemahan juga. Selain itu adanya alih fungsi lahan sebagai penyebab kurangnya sarana/prasarana pertanian untuk pengembangan tanaman pangan.

#### c. Keuangan

Kurangnya permodalan yang digunakan untuk pertanian dan pengembangan tanaman pangan juga berpengaruh kepada semangat petani untuk mengembangkan lahan disekitar mereka. Selain itu, adanya perubahan iklim yang tidak menentu yang tidak disertai

dengan teknologi yang mendukung untuk mengatasi perubahan iklim ini karena dana yang terbatas, maka banyak petani yang menyerah pada keadaan.

#### d. Teknologi

Keterbatasan teknologi tepat guna dan masih banyaknya petani yang menggunakan peralatan tradisional, sehingga penerapan sistem pertanian yang cepat, modern dan pengolahan hasil pertanian yang higienis tidak terwujud. Penerapan sistem pertanian dan pengolahan hasil pertanian yang ada sekarang masih apa adanya dan tergantung pada kondisi alam sehingga produk yang dihasilkan menjadi kurang optimal.

### B. Analisis Lingkungan Eksternal

Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan dan disahkan telah berpengaruh besar pada pembangunan dan pengembangan sektor ketahanan pangan. Hal ini tampak dari kebijakan – kebijakan yang ada baik di tingkat pusat kurang didukung dengan kebijakan yang ada di daerah karena situasi dan kondisi yang berpengaruh besar di daerah tersebut. Ada 2 faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal yaitu :

#### 1. Faktor Pendorong

Pada analisis lingkungan eksternal faktor peluang ini ada 4 hal yang sangat mempengaruhi, yaitu :

##### a. Politik

Di negara demokrasi seperti Indonesia, bidang politik sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Namun bila kebijakan politik yang dikeluarkan itu dibuat berdasarkan pada situasi dan kondisi wilayah negara kesatuan republik indonesia serta bertujuan untuk kesejahteraan rakyat indonesia, maka pembangunan pertanian dapat berjalan dengan lancar., sehingga diharapkan pembangunan pertanian merupakan prioritas pembangunan yang utama. Hasil pembangunan pertanian tidak dapat dilihat secara langsung untuk waktu sekarang, namun dapat dirasakan untuk waktu yang panjang dan berguna untuk kelangsungan hidup umat manusia dalam jangka waktu yang panjang. Untuk itu, diharapkan

para elit politik mempunyai gagasan atau program yang bisa mendukung dan mengarah untuk pembangunan pertanian..

b. Ekonomi

Bidang pertanian merupakan salah satu pendukung keberhasilan pembangunan yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa dengan mendatangkan devisa bagi negara. Bila peningkatan pembangunan ekonomi tidak dititik beratkan pada salah satu bidang, namun juga meningkatkan pembangunan pada semua bidang.

c. Persaingan

Dalam usaha pasti ada persaingan, apalagi produk yang diproduksi sama. Namun jika kita bisa mengelola dengan baik, maka kita dapat mengatasi dengan inisiatif dan kreatifitas kita sendiri. Begitu juga dengan pembangunan bidang pertanian . Bila semua masyarakat indonesia mempunyai daya kreatifitas yang tinggi, maka penganeekaragaman bahan pangan akan bervariasi sesuai daya kreatifitas masyarakat dengan berbasis bahan baku lokal. Sehingga ketergantungan bahan pangan tidak terpancang pada beras saja. Hal ini dapat mengurangi pemerintah untuk mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand. Karena ketersediaan dan keanekaragaman bahan pangan bangsa Indonesia yang cukup besar. Dengan kecukupinya stok bahan pangan di indonesia maka kita bisa mengekspor bahan pangan non beras sehingga membuat daya saing yang luas.

d. Teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan sangat terbuka luas memberi kesempatan pada petani dan penyedia bahan pangan untuk menyerap teknologi baru dengan mengembangkan produksinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi. Dengan kemajuan teknologi ini petani Indonesia mendapatkan ilmu pengetahuan serta wawasan tentang cara berbudidaya yang baik dan dapat mengembangkan potensi-potensi sumber daya lokal untuk dikembangkan dan diolah menjadi produk yang di gemari oleh

masyarakat Indonesia serta dapat dinikmati oleh masyarakat luar negeri.

## 2. Ancaman

Pada analisis lingkungan eksternal faktor ancaman sangat mempengaruhi pada :

### a. Politik

Kebijakan politik dari elit politik sangat berperan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang akan ataupun telah dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan. Hal ini dapat memengaruhi hasil yang telah dicapai, apabila kebijakan politik itu baik dan mengarah untuk kesejahteraan masyarakat luas, maka kemakmuran masyarakat akan terlihat baik. Apabila kebijakan yang dihasilkan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan, maka kesengsaraan masyarakat akan tampak, bahkan masalah baru bisa muncul dari kebijakan tersebut. Dengan adanya pengaruh dari segelintir orang yang hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan mereka kita harus mengimpor bahan pangan dari luar negeri.

### b. Ekonomi

Krisis ekonomi yang telah melanda dunia pada tahun 1997 lalu telah mengoyak perekonomian Indonesia yang mana keadaan politik juga sempat goyah dengan munculnya gerakan reformasi. Dimana pembangunan bidang pertanian juga ikut goyah dengan perubahan iklim yang sangat drastis, dimana dengan perubahan iklim tersebut terjadi kegagalan panen yang menyebabkan Indonesia mulai mengimpor bahan pangan, bukan hanya beras saja namun juga ubi-ubian harus diimpor dari luar negeri.

### c. Persaingan

Dengan berlakunya pasar bebas Asia yang dimulai pada tahun 2010 tersebut, dapat kita rasakan pengaruhnya pada tahun sekarang ini. Dimana produk-produk dari luar negeri terutama cina membanjiri pasar dalam negeri. Hal ini disebabkan bangsa Indonesia tidak siap untuk menghadapi program yang telah disepakati oleh anggota APEC. Produk dari cina yang harganya masih diatas harga local dan

jumlah yang besar telah menyisihkan produk lokal tersebut. Bangsa Indonesia malah terlena dengan perkembangan politik dalam negeri pasca reformasi ketimbang mempersiapkan kemajuan ekonomi untuk menghadapi pasar bebas. Sehingga disinilah ancaman yang menerpa bangsa Indonesia sehingga kita kalah bersaing.

d. Teknologi

Kemajuan teknologi kadang ditanggapi latah oleh penduduk Indonesia, dimana mereka kadang tidak mau menyaring perkembangan teknologi yang ada dengan benar, yang seharusnya dijadikan sebagai sumber informasi atau inovasi malah tidak ditanggapi dengan serius, malah perkembangan teknologi yang tidak dapat dijadikan tuntunan malah didahulukan. Sehingga pemerintah sebagai regulator harus bisa mengatur dengan benar.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Dalam perencanaan pembangunan lima tahun atau rencana pembangunan jangka menengah daerah pasti tidak bisa terlepas dari rencana tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian karena dalam melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang kita harus menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dengan tujuan dasar pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sedangkan bila kita telaah lebih dalam, kajian lingkungan hidup strategis juga sangat berperan penting, hal ini agar pembangunan dapat berjalan berkesinambungan atau berkelanjutan dengan tidak mengganggu lingkungan. Apabila kedua hal tersebut dikaitkan dengan pembangunan di Kantor Kecamatan Udanawu, sangat erat sekali. Pembangunan sangat didukung oleh rencana tata ruang wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis. Karena pembangunan di Kecamatan Udanawu pelaksanaannya didukung dan dilaksanakan oleh beberapa *stakeholder*, maka pembangunan yang terpadu harus benar-benar didukung dan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar adalah tujuan penataan ruang

Wilayah Kabupaten Blitar yaitu Terciptanya wilayah kabupaten blitar sebagai Kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang berbasis Keharmoisian lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah .

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan hidup strategis meliputi : kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan Tata ruang RTRW berfungsi sebagai alat operasional pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten blitar.

RTRW Kabupaten Blitar menjadi pedoman untuk :

- a. Acuan dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. Acuan dalam pemanfaatan ruang/g/ pengembangan wilayah kabupaten
- c. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- e. Pedoman untuk menyusun rencana terinci tata ruang di wilayah kabupaten blitar;
- f. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan /pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, pijinan , pemberian insentif dan desinsentif, serta pengenaan sanksi

Dan Rencana pengembangan Kecamatan Udanawu antara lain:

1. Rencana Sistem pusat kegiatan sesuai dengan pasal 15 ayat huruf b yaitu Perkotaan udanawu yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan , perdagangan ,jasa, pusat layanan kesehatan , pelayanan pendidikan, industri pengolahan
2. Rencana sistem jaringan prasarana utama wilayah sesuai dengan pasal 18 ayat 3 yaitu rencana jaringan jalan propinsi yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer
3. Sesuai dengan pasal 18 ayat 4 rencana jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai jalan lokal primer.

4. Rencana sitem jaringan prasarana sumber daya air yang sesuai pasal 27 ayat 2 Daerah Aliran Sungai Udanawu Barat dan DAS Udanawu timur dan ayat 5 sistem pengendalian banjir yang terdapat pada DAS
  5. Kawasan perlindungan setempat Pasal 33 ayat 7 kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf f dengan diarahkannya dengan luas minimum kurang lebih 8.937 Hektar atau 30 % dari kawasan perkotaan yang direncanakan untuk kawasan perkotaan yang memiliki perkembangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan perkotaan yang ada disekitarnya salah satunya perkotaan udanawu.
  6. Kawasan cagar geologi Pasal 36 ayat 3 Daerahrawan letusan gunung kelud
  7. Kawasan peruntukan lain nya Pasal 48 ayat 3 Kawasan Pertahanan dan keamanan meliputi :
    - Komplek markas Kepolisian Sektor (Polsek)
    - Komando Rayon Miiter (Koramil)
  8. Kawasan pruntukan pertanian pasal 41 ayat 4 meliputi :
    - Sawah irigasi
    - Kawasan perkebunan meliputi budidaya tebu, budidaya kelapa, budidaya padi, ketela
    - Kawasan Peternakan meliputi: pengembangan peternakan besar yang meliputi ayam petelor dan ayam potong, Ikan Gurami dan Ikan Lele.
  9. Kawasan peruntukan pariwisata Pasal 45 ayat 3 kawasan wisata budaya dan ilmu pengetahuan
  10. Penetapan kawasan strategis pasal 51 ayat kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi pengembangan meliputi Kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan
- Oleh karena itu Udanawu ditetapkan menjadi kawasan strategis yaitu kawasan yang mempunyai nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi pengembangan meliputi kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan sapi , ayam petelor dan Ikan. Akan tetapi tidak menutup

memungkinkan mereka mempunyai usaha industri kecil dan mikro meliputi industri gula kelapa, industri minyak atsiri, industri kue dan makanan industri batako, industri jamu, dan apabila dikelola dengan manajemen dan campur tangan pemerintah kabupaten Blitar dalam hal pengemasan dan pemasaran produk industri ini tidak menutup kemungkinan bisa menjadi besar.

Rencana strategis (Renstra) kecamatan Udanawu secara langsung baik anggaran maupun kebijakan memang tidak berkaitan dengan KLHS akan tetapi secara tidak langsung penetapan kecamatan Udanawu sebagai kawasan strategis menuju terciptanya Kabupaten Blitar sebagai “ *Kawasan agroindustri dan Pariwisata* yang berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah mempunyai dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh kecamatan Udanawu.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Rencana strategis Kecamatan Udanawu pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan pemerintahan di kecamatan, khususnya kecamatan Udanawu, agar tercapai, efektif, efisien dan produktif dalam pelaksanaan pemerintahan..

Dalam memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan di kecamatan yang diselaraskan dengan pembangunan jangka menengah daerah (PJMD). Kecamatan Udanawu menetapkan rencana strategis, sebagai dasar acuan penyusunan pedoman dan pengendalian kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan kecamatan dalam pencapaian Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta tujuan organisasi Tahun 2016 - 2021

#### 1. Visi

- Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Blitar dan tugas pokok Kantor Kecamatan Udanawu kami menetapkan visi.

*”TERWUJUDNYA PERENCANAAN, KOORDINASI  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN  
MASYARAKAT, EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL DI  
KECAMATAN UDANAWU ”*

### **Pengertian Visi :**

- **Perencanaan**  
Perencanaan dalam arti mengumpulkan yang ada di masing - masing seksi untuk dirumuskan menjadi rancangan kegiatan diwilayah Kecamatan Udanawu.
- **Koordinasi**  
Koordinasi dalam arti penyelenggaraan pertemuan melalui rapat - rapat maupun melalui komunikasi.
- **Efisien dan Efektif**  
Melaksanakan suatu kegiatan yang sesuai dengan rancangan keputusan secara cepat dan tepat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- **Akuntabel**  
Akuntabel dalam arti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan secara profesional serta dapat dipertanggung jawabkan.

### **2. MISI**

- 1.) Mewujudkan perencanaan yang partisipatif dan sesuai dengan skala prioritas di Kecamatan Udanawu.
- 2.) Meningkatkan koordinasi pembangunan yang berada di Kecamatan Udanawu.
- 3.) Meningkatkan Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 4.) Meningkatkan Kualitas Pelayanan masyarakat.
- 5.) Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan kepada masyarakat.

### **3. Analisa SWOT**

Analisis ini dimaksudkan untuk memilah berbagai kelemahan dan kekuatan yang ada, sehingga diharapkan dapat lebih memfokuskan arah kebijaksanaan Kantor Kecamatan Udanawu melalui pendekatan SWOT Analisis

Penilaian terhadap kondisi organisasi Kecamatan Udanawu dilingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa SWOT yang melibatkan seluruh personil melalui diskusi interaktif Berdasarkan pengamatan kondisi internal ( Strengths and Weakness) dan kondisi eksternal ( Opportunity and threats ) yang melekat pada OPD Kecamatan Udanawu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Analisa lingkungan internal.

a. Kekuatan ( Strengths )

- Adanya struktur lembaga yang baik
- Adanya produk-produk perencanaan (Renja, Renstra ) yang telah disusun.
- Adanya dukungan data dan informasi
- Tersedianya anggaran yang memadai

b. Kelemahan ( Weakness )

- Jumlah Pegawai yang masih kurang
- Disiplin Pegawai yang masih rendah
- Kurangnya ruang kerja yang memadai
- Kurangnya sarana dan prasarana ( mebelair dan Computer )

2. Analisa lingkungan eksternal.

a. Kesempatan

- Banyaknya usulan program pembangunan
- Adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan (Musrenbang ) di tingkat Kecamatan.
- Partisipasi yang baik dari dinas terkait dilingkungan kecamatan udanawu dalam kegiatan-kegiatan yang ada.
- Mudahnya mengkoordinir desa-desa dalam setiap kegiatan.
- Kondisi wilayah yang mendukung untuk memudahkan komunikasi.

b. Ancaman.

- Kurangnya kualitas program usulan pembangunan dari desa-desa.
- Belum adanya kesamaan persepsi terhadap program pembangunan
- Kurangnya pemahaman Kepala Desa terhadap tugas-tugasnya
- Rendahnya kualitas SDM Masyarakat

c. Faktor – faktor penentu keberhasilan dalam mencapai misi Kecamatan Udanawu adalah sebagai berikut :

- Optimalisasi Kelembagaan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan program - program pemerintah.
- Peningkatan Pembinaan Pemerintah Desa.
- Peningkatan Koordinasi antara Instansi yang ada Sosialisasi program – program Pemerintah dalalam pelaksanaan pembangunan di desa – desa.

**Isu – isu Strategis**

Penyebab :

Perlu peningkatan sumber daya aparatur pemerintah, baik di desa maupun kecamatan.

**Masalah :**

- Sumberdaya manusia yang masih kurang, baik kuantitas maupun kualitas.
- Sarana prasarana kurang mencukupi.
- Perlu ruang pelayanan 1 atap
- Perlu adanya alur pelayanan yang jelas.

**BAB IV**  
**VISI, MISI, TUJUAN,**  
**SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**4.1. Visi dan Misi Kepala Daerah**

Apabila kita pahami dengan seksama dari visi Kepala Daerah terpilih, maka kita dapat menarik suatu garis besar bahwa dari visi dikaitkan dengan tugas dan fungsi kantor Kecamatan Udanawu yang merupakan kepanjangan tangan Kepala Daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka Kecamatan Udanawu merupakan ujung tombak keberhasilan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih tersebut, dengan :

1. Menciptakan kinerja Pegawai di Kecamatan Udanawu yang baik dengan meningkatkan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai sector yang mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan menciptakan iklim keamanan yang kondusif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. Mengembangkan sikap mental positif sehingga dapat membangun citra pemerintahan/birokrasi yang bersih.
4. Melibatkan masyarakat sebagai bahan integral dari sistem pembangunan dengan mengembangkan dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pengambil keputusan.

**4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD**

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kantor Kecamatan Udanawu bertujuan untuk memutar roda pemerintahan dan pembangunan sebagai realisasi amanah yang telah ditentukan oleh aturan perundang – undangan yang telah berlaku dalam rangka melayani masyarakat untuk kebutuhan administrasi serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Program dan kegiatan Kantor Kecamatan Udanawu secara internal adalah meliputi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan seluruh staf, sehingga suatu organisasi Pemerintahan dapat terwujud yang kuat dan

berwibawa . Sedangkan secara ekstern adalah kepada Dinas – dinas instansi terkait dan masyarakat secara umum

Dalam pelaksanaan tugas, Kantor Kecamatan Udanawu mempunyai tujuan yang ingin dicapai :

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintahan Kecamatan Udanawu ;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Adapun sasaran yang hendak di capai oleh Kantor Kecamatan Udanawu, dari tujuan diatas adalah :

1. Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Udanawu ;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas, Kantor Kecamatan mengambil langkah-langkah prioritas, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dengan :

- g. Meningkatkan kondisi yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahandan pembangunan berdasarkan kebijakan peraturan perundang – undangan yang ada ;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan anggaran secara baik dan benar ;
- i. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan di Kecamatan ;
- j. Meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat
- k. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan public ( Pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Surat keterangan dan lain – lain )
- l. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan masyarakat
- m. Meningkatkan system pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( OPD )

Tujuan, sasaran dan indikator serta target pencapaian dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

SASARAN RPJMD Kabupaten Blitar	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Target Indikator Sasaran Pada OPD					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya pelayanan publik	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang lebih baik di kecamatan	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan kecamatan	Indeks kepuasan aparatur	Data dasar	N A	Baik	Baik	Baik	Baik
Meningkatnya keefektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja	Terwujudnya keefektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana aparatur kecamatan	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan Kecamatan.	Data dasar	N A	Baik	Baik	Baik	Baik
Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap peraturan tentang pelayanan	Terwujudnya pemahaman aparatur terhadap peraturan tentang pelayanan di kecamatan	Mewujudkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di kecamatan	Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur	Data dasar	N A	Baik	Baik	Baik	Baik

Meningkatnya keefektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur	Terwujudnya perencanaan ,penganggaran,pe ngendalian dan pelaporan capaian kjerja dan keuangan sesuai peraturan dan tept waktu	Mewujudkan dokumen perencanaa n ,pengan ggaran dan pelaporan yang berkualitas	Prosen tase dokumen perencanaan ,laporan keuangan dan ki nerja OPD yang disusu tepat waktu	CC	CC	B	B B	A	A
Men i gkatn ya pemahaman aparatur terhada peraturan ten tang pelayanan men igkat	Mewujudkan ualitas pelayanan kepada masyarakat yang proesional	Menigkatnya pelayanan dikecamatan	Indeks kepuasan masyarakat/	Data dasar	N A	Baik	B aik	Baik	B aik
Meni gkatnya kemandirian Desa	Mewujudkan kemandirian Desa di Kecamatan Udan au	Mnigkatnya kualitas admin istrasi desa/kelurahan	Prosen Tase Penin Gkatan Desa Dengan Admin Istrasiberkualitas Baik	Data dasar	N A	Baik	B aik	Baik	B aik

### 4.3. Strategi dan Kebijakan OPD

Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian Visi dan Misi ke-4 tentang meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam kurun waktu lima tahun ke depan, maka perlu langkah strategis dan rencana organisasi sebagai berikut :

#### Langkah Strategis yang dijalankan :

1. **Strategi kesatu**, melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel;  
**Arah kebijakan** : peningkatan konsistensi terhadap dokumen perencanaan
2. **Strategi kedua**, meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah;  
**Arah Kebijakan** : peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. **Strategi ketiga**, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah;  
**Arah Kebijakan** : menerapkan pembinaan kinerja aparatur
4. **Strategi keempat**, menerapkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan efisien;  
**Arah Kebijakan** : peningkatan standart kualitas pelayanan SKPD

#### Langkah rencana organisasi yang perlu dilakukan :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan;
2. Membangun komitmen seluruh aparatur Kecamatan Srengat dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sesuai dengan jabatan masing-masing untuk mewujudkan akuntabilitas;
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;

4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

**Tabel 4.3**  
**Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>VISI : Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing</b>					
<b>MISI IV : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi</b>					
<b>Sasaran RPJMD</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Program</b>
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kefektifan dan Efisiensi serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabe	peningkatan konsistensi terhadap dokumen perencanaan	Program Perencanaan , Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah	peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah	menerapkan pembinaan kinerja aparatur	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	menerapkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan efisien	peningkatan standart kualitas pelayanan SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan</li> <li>• Program Pelayanan Kecamatan</li> </ul>

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Untuk mendukung strategi dan kebijakan yang telah dijabarkan pada bab IV, maka perlu disusun program dan kegiatan yang dapat memperlancar tujuan dari pembangunan untuk 5 tahun mendatang. Untuk itu kantor kecamatan Udanawu telah membuat program / kegiatan, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Program perencanaan penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan,
  - a. Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja
  - b. Kegiatan Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan
  - c. Kegiatan Fasilitasi pengelolaan data wilayah
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kecamatan
5. Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
  - a. Kegiatan Pembinaan administrasi Desa/Kelurahan
  - b. Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di wilayah
6. Program Pelayanan Kecamatan
  - a. Kegiatan Fasilitasi dan monev pelayanan publik di wilayah Kecamatan

Adapun rincian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 5.1 ;Tabel 5.2 dan 53 berikut ini :

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Penetapan indikator kinerja kantor Kecamatan Udanawu kabupaten blitar bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode jabatan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Blitar periode 2016-2021 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Ukuran kemajuan yang diperoleh daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut, di antaranya sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil - hasil atau kinerja pembangunan sehingga dapat diperbandingkan kondisi-kondisi awal yang diinginkan dengan hasil yang dicapai. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu; aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Sedangkan Indikator Kinerja Kecamatan Udanawu yang mengacu pada sasaran dan Tujuan RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	90%	91 %	90 %	90 %	91%	91 %	92%	92 %
2.	Prosentase pemenuhan kebutuhan fasilitas sarana prasarana aparatur	90%	90 %	90 %	91 %	91 %	91 %	92 %	92 %
3.	Prosentase perenc. Penganggaran, pengendalian serta pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu	90 %	90 %	90 %	90 %	91 %	91 %	91 %	91 %
4.	Prosentase partisipasi masy. Dalam pembangunan	90 %	90 %	90 %	90 %	91 %	91 %	91 %	92 %
5.	Prosentase peningkatan pelayanan Kecamatan	-	-	70%	90%	90%	90%	90%	92%

